

## KANTOR PERWAKILAN DAERAH KPPU

### SURABAYA

Gedung Mandiri  
Jl. Basuki Rahmat No. 129-137  
Lt. 7. Ruang 703  
Surabaya 60271  
Telp. : 031-5454 4146, 534 4410  
Fax. : 031-5341 949  
Email : kpd\_surabaya@kppu.go.id

### BATAM

Gedung Graha Pena Lt. 3A  
Jl. Raya Batam Center Teluk Tering  
Nongsa - Batam  
Kepulauan Riau 29461  
Telp. : 0778-469 337, 469 433  
Email : kpd\_batam@kppu.go.id

### MEDAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A  
Medan  
Sumatera Utara  
Telp. : 061-414 8603  
Fax. : 061-414 8603  
Email : kpd\_medan@kppu.go.id

### MAKASSAR

Gedung Keuangan Negara (GKN) II  
Lt. 6, Jl. Urip Sumohardjo KM. 4  
Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang  
Kota Makassar 90232  
Telp. : 0411-429927, 429957, 429958  
Email : kpd\_makassar@kppu.go.id

### BALIKPAPAN

Gedung BRI Lt. 7  
Jl. Sudirman No. 37  
Balikpapan  
Kalimantan Timur 76112  
Telp. : 0542-730 373  
Email : kpd\_balikpapan@kppu.go.id

# KOMPETISI

Edisi 51/2015

## SIAP MEMENANGI PASAR TUNGGAL ASEAN



**HALO HUMAS**  
021- 34831563

### GEDUNG KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta 10120  
Telp. 021-3507015 / 16 / 43  
Fax. 021 - 3507008

# KPPU

KOMISI  
PENGAWAS  
PERSAINGAN  
USAHA

www.kppu.go.id | infokom@kppu.go.id | @KPPU | KPPUINDONESIA

ISSN 1979-1259



Persaingan Sehat  
Dimulai dari Pemikiran Positif





**DAFTAR ISI**



**BINGKAI 18**

**KETUA KPPU BERTEMU  
MENTERI PERDAGANGAN**

**8**

**KILAS KPD**

**13**

**KEGIATAN**

**PERKUAT PENGAWASAN, KPPU  
GANDENG  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**20**

**WAWANCARA**

**"HARUS SIAP MEMENANGKAN  
PERSAINGAN GLOBAL"**

**22**

**WAWANCARA**

**BERBAGI PENGALAMAN YANG  
MENYEGARKAN BERSAMA  
NADIEM MAKARIM**

**26**

**WAWANCARA**

**"KEBUN BIBIT, BUKAN  
SEKADAR TOKO TANAMAN  
ONLINE BIASA"**

**29**

**PENEGAKAN HUKUM**

**KETUA KPPU: JIKA ADA  
PERMAINAN "MAFIA"  
BERAS, KPPU AKAN TINDAK  
TEGAS!**

**30**

**PENCEGAHAN**

**KAPOLRI DUKUNG PENUH KPPU  
BERANTAS KARTEL**

**34**

**KLINIK KONSULTASI**

**35**

**KLINIK MERGER**

## PERMOHONAN DATA DUGAAN KARTEL DAGING SAPI JABODETABEK

Pertanyaan : **Erik Anugra Windi**

Saya Erik Anugra Windi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Saat ini saya sedang menyelesaikan skripsi tentang penanganan perkara dalam dugaan kartel daging sapi Jabodetabek yang sekarang sedang ditangani KPPU.

Pertanyaan saya, apakah KPPU bisa memberikan data pendukung berupa daftar pasokan daging sapi impor dari beberapa feedloter di wilayah Jabodetabek?

Terima Kasih.

### Jawaban :

*Untuk mengajukan permohonan data di KPPU, Erik bisa mengirimkan surat pengantar dari kampus/fakultas, proposal dan daftar pertanyaan. Silahkan kirim ke infokom@kppu.go.id atau melalui alamat kantor di Jl. Juanda 36, Jakarta Pusat, 10120 dan ditujukan ke Ketua KPPU. Untuk lebih jelas, Adam bisa mengakses website atau melalui sambungan langsung ke Bagian Humas di nomor 021-34831563. Jika ingin lebih memperdalam ilmu hukum persaingan, Erik juga mengajukan magang di KPPU.*

## PERMOHONAN WAWANCARA

Pertanyaan : **Fernando Dairi**

Saya Fernando Dairi, mahasiswa Program Magister (S-2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan penulisan tesis dan ingin mengajukan permohonan wawancara tentang tying agreement. Selanjutnya prosedur dan berkas apa yang harus Saya lengkapi?

### Jawaban :

*Untuk melakukan wawancara Fernando bisa mengirimkan surat pengantar dari kampus/fakultas, proposal dan daftar pertanyaan. Silahkan kirim ke infokom@kppu.go.id atau melalui alamat kantor di Jl. Juanda 36, Jakarta Pusat, 10120. Selanjutnya akan dibantu oleh Bagian Hubungan Masyarakat untuk melakukan wawancara dengan pihak dari KPPU.*

## KOMPETISI

**DEWAN PAKAR** : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., Ir. Muhammad Nawir Messi, M. Sc, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja, MBA, Drs Munrokhim Misanam, MA. Ec. Ph.D., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., **PENANGGUNG JAWAB** : Mohammad Reza, **PEMIMPIN REDAKSI** : Dendy R. Sutrisno, **REDAKTUR PELAKSANA** : Nanang Sari Atmanta, **REDAKSI** : M. Isnaeni, Hira Puspita P. **ALAMAT REDAKSI** : Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 HALO HUMAS 021-34831563 SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 | Email: infokom@kppu.go.id | Website: www.kppu.go.id

KICAU



**VerryIskandar @verryiskandar**

@KPPU\_RI Ayo KPPU, PersainganToko Online Sulit dipantau KPPU

**ZeniWibowo @yongkru\_61989**

Bpk2 tolong tindak promo grab bike...karena bisa mematikan penghasilan angkutan umum lainnya... Mksh.

**Mr. Prince @anakkopi**

Ini isu pelarangan ojek online masuk wilayah kalian gak? KPPU? Selidiki dong motif pelarangan dari Kemenhub

**RendraJatmika @ren2ja**

Membedakan harga pekerjaan kontraktor aja udah monopoli khan?

**Rielyandi Putra @rielyandi**

Di bandara ini @SSK2\_PKU terjadi praktek monopoli armada taksi koperasi @TNI\_AU dan taksi KOPSI.

**HeriGunawan @HeriGunawan**

Demi persaingan usaha yang sehat, mari kita duduk bersama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

**AwaludinYasir @AwalYasir**

Bang Syarkawi...Tlg diperhatikan juga kartel bunga di perbankan & LK lainnya yg memakai prinsip piramida terbalik.

**Andhika Willy W. @Dhik\_Andhi**

Kalau pelaku usaha hendak konsultasi tentang perjanjian yang berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, kebagian apa ya?

**Assiry @ljej**

Apakah saya bisa mendapatkan data market share (pangsa pasar) perusahaan2 sawit di Indonesia (bukan ekspor) Thank you.

# DARURAT PANGAN JELANG MEA

**P**engelolaan pangan hingga kini masih mengkhawatirkan. Fenomena kenaikan dan kelangkaan beras, melambungnya harga daging sapi, naiknya harga bawang putih yang sungguh tidak masuk akal, semua ini akibat dari ketidaksiapan pemerintah dan tentu perilaku “nakal” segelintir pihak yang ingin mengeruk keuntungan. Di tengah perubahan iklim yang terus mempengaruhi stok pangan dunia, Indonesia ada di posisi yang cukup mengkhawatirkan. Rebutan pangan akan terjadi.

Pada 2016, kondisi pangan bisa diprediksi masih stagnan dan proses impor cenderung akan meningkat. Sayangnya lagi, kondisi ketergantungan terhadap impor ini tidak hanya melanda komoditas pangan, melainkan juga pada sarana produksi, seperti pupuk dan benih.

Kondisi produksi yang stagnan ini jelas disebabkan dampak dari El Nino (Super El Nino) yang masih terus akan berlanjut. Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), gejala El Nino tahun ini diperkirakan mulai reda November, namun data yang rilis NASA, ESA, NOAA dari hasil pemetaan satelit antariksa terbaru, gejala alami tahunan itu akan berlangsung lebih lama hingga Februari 2016 mendatang. Super El Nino akan berdampak terhadap negara-negara di Asia, Amerika Selatan dan Karibia. Pada akhirnya, produksi pangan dunia akan turun.

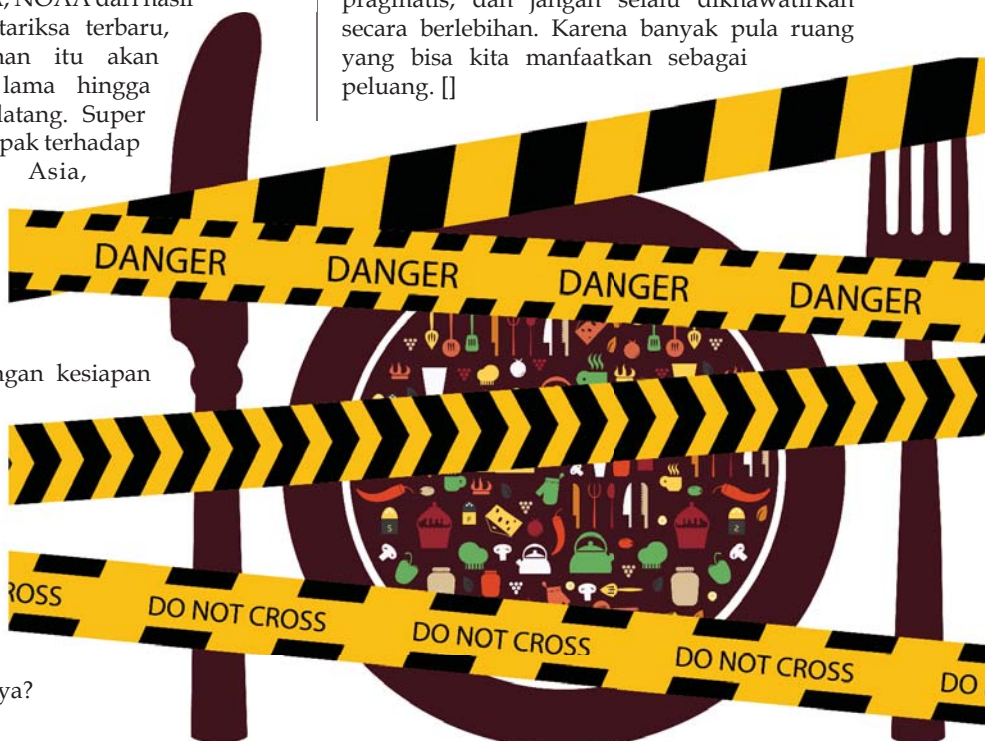
Lalu bagaimana dengan kesiapan Indonesia dalam hal ketersediaan stok pangan ini? Bagaimana ketika arus barang dan jasa yang masuk ke Indonesia akan bersaing dengan produk-produk negara ASEAN lainnya?

MEA bisa menjadi petaka apabila produk pertanian kita tidak mampu bersaing dengan produk pertanian dari negara ASEAN lainnya. Aliran modal dan investasi dari luar hanya mengeruk hasil bumi dan tenaga kerja terdidik menjadi penonton di negaranya sendiri. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan sektor pertanian Indonesia dengan cara memperkokoh sinergi antara wilayah untuk menjadi kesatuan yang kuat di tingkat ASEAN.

Mengembangkan inovasi dan teknologi dan penyiapan infrastruktur pendukung dalam rangka meningkatkan daya saing, harmonisasi prosedur, peraturan dan standar yang menuju pada peningkatan kualitas dan keamanan pangan (dimana hal ini mengacu pada AEC blueprint).

Pemerintah juga harus segera mendorong penciptaan pasar-pasar baru bagi berbagai produk Indonesia. Jika Indonesia tidak siap, maka bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi pasar berbagai produk impor.

Selanjutnya, MEA harus dihadapi dengan realitis, pragmatis, dan jangan selalu dikhawatirkan secara berlebihan. Karena banyak pula ruang yang bisa kita manfaatkan sebagai peluang. []



BINGKAI





Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf (tengah) bersama Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie (kiri, kerudung merah) dan Anggota Komisi Sukarni (kanan, kerudung biru) saat menggelar sidak di Pasar Induk Beras Karawang (PIBK), Jum'at (28/11/2015).

KPD BALIKPAPAN

**GELAR KULIAH UMUM, KPD BALIKPAPAN SAMBANGI UNIVERSITAS MULAWARMAN**



id.wikipedia.org

**D**alam rangka melakukan edukasi tentang hukum persaingan usaha di lingkungan kampus, KPD Balikpapan memberikan kuliah umum tentang merger di

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Balikpapan, (10/9).

Acara yang diikuti 115 mahasiswa ini diselenggarakan di Aula lantai 1 Gedung A FH Unmul. Sesi kelas dimulai dengan definisi merger, pembagian jenis-jenis merger dan bentuk-bentuk penggabungan usaha di Indonesia. Termasuk dimana posisi ideal dan tanggungjawab KPPU dalam menegakkan hukum persaingan ketika proses merger antar perusahaan dilakukan.

Kuliah umum yang tepat dimulai pukul 14.00 WITA ini

menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Unmul Irvan Zailani, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Charles Panji Dewanto, Investigator KPPU Mulyawan Ramanenggala dan Kepala KPD Balikpapan Akhmad Muhari.

Selepas kuliah umum, mahasiswa diwajibkan menyusun makalah mengenai materi yang telah dibahas. Dekan FH Unmul Irvan menambahkan bahwa banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari sesi kuliah umum bersama KPPU untuk menjadi inspirasi skripsi maupun penelitian bagi para mahasiswanya. []

KPD MAKASSAR

**BAHAS PENGADAAN, WALIKOTA MAKASSAR TERIMA KUNJUNGAN KPPU**



**U**ntuk membangun sinergi lembaga, Kantor Perwakilan Daerah Makassar (KPD) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Makassar. Tim dipimpin oleh Kepala KPD Ramli Simanjuntak dan diterima langsung oleh Walikota Makassar M. Ramdhan Pomanto. Kunjungan kerja ini berlangsung di ruang kerja Pemkot Makassar, Kamis

(29/10/2015). Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Muh. Ansar.

“Saya yakin sinergi antara KPPU dengan pemerintah kota maupun daerah mampu membantu harmonisasi peraturan yang sudah ada agar selaras dengan UU persaingan,” ujar Ramli.

Menurut Ramli, kerja-kerja advokasi yang dilakukan KPPU sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya KPD sebagai ujung tombak penegakan hukum persaingan di daerah. Ramli juga berharap agar Walikota memberikan instruksi secara tegas ke seluruh SKPD agar bermitra baik dengan KPPU.

Sementara itu Ramdhan mengungkapkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang berlangsung di lingkungan pemerintah kota memang memerlukan dukungan KPPU. Ia berharap agar KPPU segera melakukan sosialisasi secara mendalam mengenai pengadaan yang menggunakan prinsip persaingan usaha sehat.

“Saya akui, saat ini proses pengadaan di lingkungan pemerintah kota sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, UU No. 5 Tahun 1999 ini tentu akan menjadi ilmu baru bagi para pejabat pengadaan di lingkungan kerja kami. Tentu Pemkot Makassar sangat terbuka jika KPPU berkenan mendampingi kami,” tutur Ramdhan. []



KPD BATAM

## BERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PELAKU USAHA, KPD BATAM GELAR SOSIALISASI KEMITRAAN



Bekerjasama dengan Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi (PKA), KPD Batam menggelar sosialisasi terkait Kemitraan dengan sejumlah pelaku usaha di kota Batam pada Jum'at, (2/10/2015) di Kantor Perwakilan Daerah Batam (KPD).

Anggota KPPU Saidah Sakwan yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan bahwa ketidakseimbangan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM membuat mereka (UMKM) menjadi sulit berkembang. "Perkembangan UMKM memiliki banyak kendala. Modal kecil sementara

persaingan sangat ketat dan tanpa perlindungan, hal ini membuat UMKM semakin terpinggirkan," ujar Saidah.

Hal senada disampaikan oleh Direktur PKA, Taufik Ahmad. Ia menegaskan bahwa pada prakteknya, banyak UMKM dirugikan dalam perjanjian kemitraan karena posisi tawar yang sangat rendah terhadap pelaku usaha besar. "UMKM ini banyak sekali dirugikan dalam menjalin kemitraan dengan pelaku usaha besar, karena posisi tawar mereka sangat rendah. Sehingga tidak jarang mereka menjadi korban kesewenang-wenangan pelaku usaha besar," kata Taufik.

Tujuan pengawasan kemitraan ini adalah guna menghindari terjadinya kemitraan palsu. Kemitraan jenis ini ditujukan untuk memperoleh fasilitas dari Pemerintah terkait usaha kecil. Dalam hal ini, pelaku usaha kecil yang bermitra sesungguhnya dimiliki oleh pelaku usaha besar, yang menjadi mitranya. Selain itu, pengawasan kemitraan juga bertujuan menghindari penyalahgunaan posisi tawar (*abuse of bargaining position*) oleh pelaku usaha besar/ menengah terhadap pelaku usaha mikro/ kecil yang menjadi mitranya.[]

**KPD MEDAN****SAMAKAN PERSEPSI, KPD MEDAN GANDENG SETDAKO BANDA ACEH**

**K**antor Perwakilan Daerah Medan (KPD), Kamis (19/11), menggelar audiensi dengan pejabat di jajaran Setdako Banda Aceh. Kegiatan yang dihadiri oleh Sekda Kota Banda Aceh, Ir. Bahagia Sah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini bertujuan untuk

membangun sinergi penegakan hukum persiapan usaha di daerah.

Kepala KPD Medan Abdul Hakim Pasaribu mengungkapkan bahwa sebagai ujung tombak KPPU di daerah, pemerintah daerah merupakan mitra tepat dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Jika terdapat beberapa peraturan daerah yang belum sinergi dengan UU No. 5 Tahun 1999, KPD Medan siap memberikan edukasi berupa pendampingan terhadap jajaran SKPD.

Sementara itu Bahagia Sah mengungkapkan bahwa dirinya akan menginstruksikan ke jajaran SKPD agar segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan mengadakan sosialisasi tentang UU No. 5 Tahun 1999.

“Saya yakin KPD Medan akan menjadi mitra strategis bagi Kami, Setdako Banda Aceh. Akan segera saya instruksikan ke jajaran SKPD agar segera diadakan sosialisasi, karena ini benar-benar penting,” ujar Bahagia Sah.[]

**KPD SURABAYA****JAKARTA KISRUH BERAS, KPD SURABAYA GELAR SIDAK**

**K**etidakberesan niaga beras di Jakarta terungkap saat Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya melakukan sidak di sentra beras di Bendul Merisi dan Pasar Tembok Surabaya, Jum'at (27/11/2015). Sidak ini dilakukan setelah Jakarta kesulitan mendapatkan pasokan beras dan harganya juga mahal.

“Pasokan beras di Jakarta berkurang sehingga harganya naik,” ujar Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armando,

menyampaikan informasi itu. Karena ada laporan itulah, lanjut dia, KPPU langsung sidak di beberapa toko beras di kota ini. Dan itu tidak hanya dilakukan Surabaya, tapi serentak oleh KPD daerah lain seperti di Sumatra utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.

Menurut Aru, pasar perdagangan beras di Surabaya saat ini kondusif, belum ada gejolak, harga berasnya juga normal. “Harga beras termasuk pasokan dan stok di Surabaya normal. Memang ada kenaikan 100-200 per kg, tetapi itu wajar. Di sini harga beras secara umum 9.300, tetapi di Jakarta 10 ribu,” kata Aru.

Namun, ada keanehan yang ditemukan KPD saat melakukan sidak bersama Disperindag dan Dinas Pertanian Surabaya ini. Beberapa pedagang yang ditemui mengatakan bahwa mereka

ditolak saat memasok beras ke Jakarta. “Saya dan pedagang beras coba menjual beras ke Jakarta, tapi ditolak, katanya stok pusat masih cukup,”

Dalam sidaknya bersama Disperindag dan Dinas Pertanian Surabaya itu, beberapa pedagang besar beras di Surabaya mengaku telah menawarkan siap memasok beras ke pedagang beras di Jakarta justru ditolak. “Pedagang beras di sini menjual beras ke Jakarta, tetapi ditolak karena katanya stoknya masih cukup. Padahal laporannya tidak demikian,” tutur Aru.

Mensikapi hal ini, KPD Surabaya akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan pusat KPPU di Jakarta. Ia yakin KPPU akan menurunkan tim terbaik untuk menangani persoalan pasokan beras ini.[]



**Unfair competition must STOP!**

## BERSAMA PRESIDEN, KETUA KPPU SAMBUT KAPAL TERNAK PERDANA DI PRIOK



**B**ersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ketua KPPU menyambut kedatangan sekitar 350 ekor sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibawa dengan kapal khusus KM Camara Nusantara I, pengangkut ternak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jum'at (11/12). Ikut serta dalam penyambutan tersebut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Benny Alexander Litelhoni.

Jokowi mengatakan dengan adanya kapal pengangkut ternak sapi ini membuat biaya transportasi (pengangkutan) mengalami penurunan yang drastis. Presiden mengatakan biaya transportasi antar provinsi turun dari 1,5 juta menjadi 320 ribu.

“Dengan adanya model pengangkutan seperti ini, jadi ada efisiensi, ongkos transportasi yang dulunya 1,5-1,8 juta sekarang jadi 320 ribu. Ini yang sering kami bilang tol laut, sebetulnya ya ini,” kata Jokowi di depan awak media dan rombongan pejabat dari beberapa kementerian/lembaga.

Jokowi mengatakan harga daging di provinsi asal bisa mencapai 30 ribu per kilo. Setelah disembelih, harganya jadi 35 ribu sampai 37 ribu. Lalu, setelah jadi rendeman, harga jadi 72-76 ribu. “Harga rata-rata menjadi segini. Harga seperti ini semoga dalam waktu yang tidak lama bisa menormalkan semuanya kembali,” ujar Jokowi.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf menilai bahwa upaya pemerintah dalam mendatangkan sapi siap potong dari daerah sentra produksi dengan kapal ternak harus diikuti juga oleh pihak swasta.

“Ini pemerintah kan sebagai pilot project, ini harusnya lebih massif bukan hanya dilakukan pemerintah tapi juga swasta,” ujar Syarkawi. Syarkawi mengatakan, sebesar 70 persen konsumsi daging sapi nasional berada di wilayah DKI Jakarta. Untuk tingkat kebutuhan daging sapi di Jakarta sebanyak 4 ribu ton per hari.

Lebih lanjut, secara khusus KPPU memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah memberikan perhatian khusus terkait persoalan mahalanya daging sapi, yakni dengan mendatangkan sapi langsung dari daerah penghasil melalui kapal khusus pengangkut ternak.[]

# PERKUAT PENGAWASAN, KPPU GANDENG UNIVERSITAS INDONESIA



Untuk membangun sinergi dengan dunia kampus, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkolaborasi melalui penandatanganan kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk mewujudkan ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan.

“Kami yakin kampus akan jadi mitra strategis bagi KPPU untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, khususnya untuk para mahasiswa yang nantinya akan menjadi tokoh di balik sebuah perilaku bisnis maupun menjadi penegak hukum,” ujar Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Rektorat UI, Depok, (23/10).

Syarkawi juga Kerjasama ini diharapkan akan segera dilanjutkan dengan kerja-kerja konkrit, misalnya melalui penelitian atau kajian bersama serta kegiatan *capacity building* bagi para dosen maupun mahasiswa.

Sementara itu, Rektor UI Muhammad Anis, mengatakan bahwa tujuan kerja sama ini adalah untuk mewujudkan ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Anis juga sangat berharap agar elemen paling mendasar di kampus, yakni mahasiswa, segera diberikan pemahaman mendasar mengenai UU No. 5 Tahun 1999.

“Mahasiswa-mahasiswa itu nantinya akan lulus, dan mereka akan jadi aktor dibalik sebuah bisnis, juga jadi penegak hukum. Jadi sangat tepat ketika UI menjalin kerjasama dengan KPPU,” tutur Anis.

Menurut Anis, dua lembaga ini tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan pengawasan. “Kerja sama dengan KPPU ini seperti gayung bersambut. Kerja sama ini memperkuat KPPU sesuai amanah undang-undang,” tambah Anis.[]

## SEKRETARIS KABINET DUKUNG PENGUATAN KELEMBAGAAN KPPU



**D**ukungan terhadap KPPU untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun semakin mengalir kuat. Kali ini, dukungan datang dari Sekretaris Kabinet Indonesia (Seskab) Pramono Anung saat melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, Jum'at, (23/10). Pertemuan ini juga diikuti oleh tiga Anggota KPPU Saidah Sakwan, Tresna P. Soemardi dan Kamser Lumbanradja.

Pada pertemuan tersebut Syarkawi mengungkapkan bahwa KPPU membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan kelembagaan KPPU yang sekarang sedang bergulir di Kemenpan.

Syarkawi menegaskan bahwa KPPU adalah lembaga strategis yang sudah sepantasnya mendapatkan prioritas dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Beberapa program kerja (Nawa Cita) yang diusung Presiden bahkan secara langsung telah menyebutkan nama KPPU dalam RPJMN 2015-2019.

Sementara itu Pramono Anung mengungkapkan bahwa sebagai pihak yang berhubungan dekat dengan RI-1 dan RI-2, ia akan meneruskan hasil pertemuan terbatas ini ke Presiden. Pramono yakin KPPU adalah lembaga yang independen dan memiliki pengaruh cukup kuat dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.[]

# PEMERINTAH PERLU SEGERA LAKUKAN MARKET REFORM



**M**encermati perjalanan penegakan hukum persaingan usaha selama setahun penuh ini banyak hal yang bisa diungkap dan segera diselesaikan. Perkembangan kasus kartel semakin beragam, persekongkolan tender masih terjadi, sampai dengan naik turunnya komoditas pangan yang masih terus dimainkan pelaku usaha “nakal”. Hal ini terungkap dalam Seminar Sehari “Kilas Balik Penegakan Hukum Persaingan Usaha 2015,” yang digelar di Saripan Pacific Hotel, Jakarta, Rabu (25/11).

Seminar sehari ini menghadirkan Ekonom Haryo Aswicahyono, Ekonom Pertanian Bustanul Arifin, Anggota KPPU M. Nawir Messi dan Chandra Setiawan serta Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf. Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil yang dijadwalkan datang membuka acara urung hadir karena ada keperluan mendadak.

Dalam paparannya, Syarkawi menilai *market reform* perlu segera dilakukan untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif.

Syarkawi mengatakan institusi seperti kelembagaan dan peraturan yang mengakomodasi mekanisme pasar di Indonesia sekarang ini masih sangat lemah.

Menurut Syarkawi, saat ini KPPU akan mulai fokus dengan menyuarakan reformasi pasar (*market reform*) sebagai program utama. Hal ini untuk menanggulangi persaingan usaha yang tidak sehat karena dikuasai segelintir pihak tertentu.

Sementara itu Ekonom Pertanian Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan KPPU selama 2015 sekarang ini sudah cukup tepat. Beberapa perkara yang menyinggung hajat hidup publik mulai KPPU sentuh, misalnya kasus daging, obat dan sekarang ini beras.

Persoalan kelangkaan pangan, diakui saja memang hal itu terjadi dan dirasakan masyarakat luas. Dugaan soal mafia itu memang benar-benar ada, namun untuk membuktikannya bukan persoalan yang mudah.[]

## JELANG MEA, MENTERI PERDAGANGAN TEMUI KETUA KPPU



**K**etua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Pertemuan empat mata ini membahas dua persoalan besar yang saat ini menjadi fokus penegakan hukum persaingan, yakni pengawasan distribusi pangan dan penguatan kelembagaan KPPU jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Syarkawi Rauf yang pada kesempatan tersebut mengenakan batik lengan panjang mengatakan, tujuannya bertemu dengan Mendag adalah untuk membahas pengawasan distribusi pangan. Menurut Syarkawi, pertemuan ini adalah bagian dari instruksi Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu bertemu KPPU dan langsung memberikan instruksi agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan.

“Pertemuan saya dengan Pak Mendag ini untuk berkoordinasi. *Pertama*, dulu ketika bertemu dengan Pak Jokowi di istana ada dua hal penting yang kita diskusikan. Soal koordinasi pengawasan distribusi komoditas pangan strategis, seperti beras, daging dan seterusnya,” ujarnya di kantor KPPU, Jl. Juanda, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Selain itu, Syarkawi menambahkan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan untuk terlibat aktif dengan KPPU dalam penegakan hukum yang nantinya akan melibatkan perusahaan lintas negara, yakni MEA.

“Kita juga bicarakan secara detail substansi perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999. Pak Jokowi dan Pak Lembong ini sangat mendukung untuk memperkuat kelembagaan KPPU. Kenapa? Karena institusi KPPU akan menjadi instrumen paling tidak untuk menghambat masuknya kartel-kartel yang mungkin bersifat skala internasional dalam konteks MEA ke depan,” kata Syarkawi.

Sementara itu, Lembong mengungkapkan bahwa sebagai kementerian yang bertanggung langsung di sektor perdagangan, pihaknya memandang KPPU sebagai mitra strategis untuk mengkaji kembali kebijakan/peraturan pemerintah. Ia melihat, sektor perdagangan tidak pernah bisa lepas dari persaingan, baik yang dilakukan secara sehat maupun tidak sehat.

“Perdagangan dan persaingan itu dibidang satu konsep persaingan yang sehat. Tentunya satu aspek yang kritis untuk satu perdagangan yang sehat jadi tadi Ketua KPPU dan saya banyak bicara mengenai persaingan, tentunya fokus utama di bidang pangan dan banyak di bidang lain,” jelasnya.

Terkait dengan penguatan kelembagaan KPPU, secara khusus Lembong mendukung penuh adanya perubahan UU No. 5 Tahun 1999. Menurutnya, dengan melakukan revisi kembali undang-undang, Sekretariat KPPU akan memiliki kejelasan status organisasi.

“Saya rasa, perbaikan UU persaingan ini adalah langkah positif. Karena bagaimanapun, untuk menegakkan hukum persaingan, apalagi lintas Negara, dibutuhkan kepastian lembaga itu sendiri. Supaya KPPU ini bisa lebih objektif meneliti dan kemudian menindak jika ada persaingan yang tidak sehat,” ujar Lembong.[]



**MELALUI  
PERSAINGAN  
SEHAT TERWUJUD  
EKONOMI  
NASIONAL YANG  
EFISIEN DAN  
BERKEADILAN  
UNTUK  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT**



**KPPU**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

**BINGKAI**





Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf (kanan) saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (kiri) di kantor KPPU, Jakarta, Senin (21/12). Kedua pihak sepakat akan terus bersinergi dalam penegakan hukum persaingan, khususnya jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

**M. SYARKAWI RAUF**  
KETUA KPPU

## “HARUS SIAP MEMENANGKAN PERSAINGAN GLOBAL”



Foto: Hira

Tinggal menghitung hari, pintu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera dibuka. Sebagai negara dengan jumlah penduduk paling tinggi di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesempatan sangat besar dalam persaingan di banyak bidang, salah satunya di sektor persaingan usaha.

Berbagai pertanyaan dan kekhawatiran juga muncul di benak masyarakat. Apa itu MEA? Apa bedanya dengan AFTA? Apa yang akan terjadi setelah tanggal 31 Desember 2015? Siakah Indonesia memberlakukan MEA? Bagaimana dengan nasib pekerjaan saya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya menggambarkan dua pandangan masyarakat terhadap MEA, rasa pesimis dan kepedulian.

Usai menerima wawancara salah satu media cetak nasional, Syarkawi menerima Tim Redaksi Kompetisi Nanang Sari Atmanta dan fotografer Hira Puspita Putri di ruang kerjanya yang sederhana.

Dengan logat Makassar-nya yang khas, ia membeberkan banyak hal tentang tantangan Indonesia menghadapi era MEA. Berulang kali ia menyisipkan kalimat, “mulai sekarang, KPPU harus siap dengan era penegakan hukum persaingan usaha lintas negara.”

## **Komoditas pangan jadi penyumbang terbesar pembentuk inflasi dan garis kemiskinan di Indonesia.**

### **Seberapa besar kesiapan Indonesia (KPPU) untuk memasuki era MEA ini?**

Ini bukan lagi menunggu hitungan hari, persaingan sudah terbuka cukup lama. Tentunya kita harus siap diri, termasuk KPPU. Sebenarnya dan seharusnya ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk terintegrasi dengan dunia luar. Penegakan hukum yang dilakukan KPPU tidak hanya di Indonesia saja nantinya, tapi akan lintas negara.

### **Sudah siapkah peraturan perundangan kita, khususnya UU No. 5 Tahun 1999?**

Kalau dirunut secara peraturan perundangan, jelas UU kita belum sepenuhnya siap. Oleh karena itulah anggota komisi rutin bertemu Presiden dan Wakil Presiden membahas persoalan ini, termasuk persoalan kelembagaan KPPU jelang pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini pentingnya urgensi merevisi UU No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha dalam rangka menyiapkan langkah antisipatif terhadap transaksi bisnis di luar Indonesia, di wilayah ASEAN. Operasinya di luar sana, tapi dampak pada pasar domestik.

### **Bagaimana sikap KPPU mengenai kartel pada komoditas pangan yang sekarang ini cukup rami terjadi?**

Komoditas pangan jadi penyumbang terbesar pembentuk inflasi dan garis kemiskinan di Indonesia. Padahal, ya, kunci stabilitas harga pangan sebenarnya sederhana, yakni menjaga stabilitas harga lima komoditas pangan, utamanya itu beras. Juga, kemudian soal komoditas daging sapi yang kenaikan harganya cukup tinggi. Maka dari itu, perkara daging sapi yang sedang berjalan ini benar-benar kita kejar

terus. Supaya ada kepastian dan ketenangan di masyarakat.

### **Beberapa pengamat memandang pesimis dan cukup khawatir dengan kesiapan Indonesia di MEA ini?**

Kenapa cemas? Nggak perlu cemas, Indonesia itu lebih perkas dibanding negara ASEAN lainnya. Makro ekonomi kita di tahun ini trennya cukup positif, ekonomi juga tumbuh dengan baik, indeks keyakinan konsumen dan investasi bisnis juga meningkat. Optimis, itu kuncinya!

### **Sebenarnya berapa besar prosentase pelaku usaha di tingkatan ASEAN?**

Kalau dari data kita, KPPU, kurang dari 20% pelaku usaha yang bersaing di tingkatan MEA itupun hanya 1% yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menengah dan besar, sisanya, ya, itu pelaku usaha kecil. Kita akui, Indonesia hanya masuk dalam 4 besar ASEAN dalam konteks daya saing GCI dibawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Ini artinya apa? Artinya sebenarnya kita cukup mempunyai potensi bersaing. Kalau dalam konteks komoditi jasa memang Indonesia tidak cukup bersaing. Berbeda dengan Negara China, secara bentuk jasa dan dagang Negara china sangat *settled*.

### **Lalu bagaimana dengan kondisi minimnya tenaga kerja terampil, siapkah Indonesia bersaing?**

Untuk hal ini mau nggak mau pemerintah harus segera turun tangan. Ancaman cukup serius adalah para tenaga kerja profesional pindah bekerja di negara-negara ASEAN lainnya. Kesempatan kerja mereka jadi lebih luas. Ruang gerak untuk berkarir ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura diakui saja memang lebih baik baik dibandingkan Indonesia. Pemerintah harus membuat program peningkatan nilai tambah tenaga kerja, perusahaan harus dituntut menciptakan iklim kerja yang ramah, upah yang baik dan fasilitas kerja yang memadai. Kalau *nggak* mau kehilangan mereka (tenaga kerja domestik), ya, pemerintah harus segera perbaiki ini semua. []

**NADIEM ANWAR MAKARIM**  
CEO PT. Go-Jek Indonesia

# BERBAGI PENGALAMAN YANG MENYEGARKAN BERSAMA NADIEM MAKARIM



Foto: Isnan

“Dahulu kala, tukang ojek dianggap sebagai profesi atau pekerjaan kelas bawah, tidak menjanjikan. Ditambah lagi dengan kelengkapan kendaraan bermotor apa adanya, *driver* yang kumal, semakin menambah rendahnya citra ojek. Namun kini, melalui sentuhan seorang Nadiem Anwar Makarim, abang-abang ojek sekarang ini memiliki nilai tawar yang cukup tinggi dimata masyarakat. Pria berusia 31 tahun yang merupakan *Chief Executive Officer* (CEO) PT Go-Jek Indonesia dan lulusan *Harvard Business School* ini bersedia menerima wawancara Tim Redaksi *Kompetisi* Nanang Sari Atmanta dan fotografer Mochamad Isnaeni.

Namun, untuk menemui dan melakukan wawancara dengan sosok Nadiem ini bukan perkara mudah. Nadiem cukup sulit dihubungi. Selama kurang lebih dua bulan, tim *Kompetisi* telah mengirimkan permohonan wawancara pada 28 Agustus 2015, sampai akhirnya Nadiem berkenan melakukan wawancara pada 6 Oktober 2015.

“Momentum itu sesuatu yang tidak kekal, *khan*, Mas? jika kamu tidak menangkap momentum itu di saat terbaiknya, kamu akan kehilangan momentum itu. *Time is money*. Di Jakarta, kemacetan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Dan kemacetan juga tidak memandang status.”

Setelah minum segelas air mineral yang ia beli di warung kopi sebelah kantor, ia mengingat kembali perkembangan Go-Jek dalam beberapa waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa apa yang telah ia raih sekarang ini terjadi karena faktor dukungan semua pihak. Ia juga mengatakan, Go-Jek ini ada di tempat dan waktu yang tepat.

Sebaliknya dari *Harvard Business School* pada 2010, Nadiem tidak serta merta langsung mengurus bisnis Go-Jek ini. Nadiem berkecimpung menjadi *Managing Director* Zalora. Disinilah Nadiem belajar mengenai ilmu *e-commerce*. Setahun berselang, Nadiem pindah ke perusahaan Kartuku, *payment technology company*. Ia belajar banyak dari perusahaan tersebut.

Barulah pada 2014 Nadiem bergabung kembali ke Go-Jek dan mulai melakukan *raise funding*. Hingga akhirnya pada 2015, aplikasi Go-Jek launching ke masyarakat luas. Awal Januari 2015 Go-Jek baru mampu mengumpulkan 700 driver, namun sekarang sudah lebih dari 200.000 driver dari 10 kota di Indonesia yang bergabung dengan aplikasi Go-Jek ini. Dan suatu prestasi yang membanggakan dimana pertamakalinya dalam sejarah, aplikasi buatan dalam negeri, Go-Jek, menduduki posisi ranking 1 di *apps store*.

### Bagaimana terkait *regulatory framework* Go-Jek?

Terkait dengan *regulatory framework* Go-Jek, Nadiem mengungkapkan bahwa bisa dibilang belum ada. Namun, Nadiem yakin suatu saat nanti akan ada karena alternatifnya saat ini tidak (belum) ada.

Dalam konteks kompetisi, perusahaan yang sudah memegang *leadership position* mungkin akan terganggu atau merasa tidak aman. Namun

demikian, dengan semakin banyaknya pilihan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi maka masyarakat akan diuntungkan.

Hal ini disebabkan perusahaan akan bersaing menawarkan harga sehingga jasa transportasi dapat menjadi lebih murah.

Saat ini ojek sendiri belum memiliki payung hukum yang pasti, karena sifatnya transportasi perorangan.

“Jadi, sesungguhnya Go-Jek ini membantu pemerintah untuk men-*draft* pengaturannya agar pendataannya bagus dan *safety standard* jelas. Nantinya, *standard* ini akan bisa di *formalize*,” kata Nadiem.

## Bagaimana pandangan Nadiem terhadap GrabBike?

Saat saya coba menanyakan lagi lebih jauh bagaimana pandangannya mengenai GrabBike yang menjadi kompetitor utama Go-Jek, Nadiem mengatakan ia selalu mendukung karya anak bangsa.

Di keluarga besar Go-Jek, ia menekankan nasionalisme menjadi hal yang paling utama. Dua kali melakukan wawancara dengan Nadiem, berulang kali ia menyebut Go-Jek adalah produk anak negeri.

Menurut Nadiem, orang Indonesia pada dasarnya memiliki skill mumpuni, tapi yang mengambil keuntungan tersebut adalah perusahaan yang memakai *skills* mereka. "Sayangnya Negara kita tidak mau memfasilitasi orang-orang yang ber-*skills* mumpuni ini. Negara tetangga saja sudah melakukan," kata Nadiem.

Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai akses dengan *end consumer*. Mereka tidak bisa mencari pelanggan sendiri dan tentunya harus selalu melalui perusahaan. Ujung-ujungnya, mereka hanya dapat 10-20% dari pekerjaan mereka. Namun dengan Go-Jek, mereka bisa menerima 75-80% daripada omset tersebut. Itulah filosofi Go-Jek.

### Middle man vs biaya logistik

Filosofi Go-Jek, menurut Nadiem, adalah menghubungkan *service provider* kepada pelanggan di sekitarnya. Oleh karenanya, ia langsung mendapatkan penghasilan dari konsumen tersebut tanpa ada *middle man*.

Dalam hal ini, *middle man*-nya adalah teknologi. Konsep ini sangat potensial apabila diterapkan pada petani, nelayan atau sektor lain yang tentunya dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi seseorang.

Satu lagi prinsip yang beberapa kali diungkapkan Nadiem, yaitu SDM. Apabila transportasi misal sudah berjalan dengan baik di Jakarta, maka 7-10 tahun kemudian pengemudi Go-Jek harus dipersiapkan untuk menghadapi bermacam perkembangan dan penggunaan teknologi.

Mereka (*driver* Go-Jek) sudah bisa menggunakan akses *internet banking*, mereka bisa menggunakan media sosial untuk kepentingan ekonomi. Skills driver akan meningkat, mulai dari transportasi, kurir, *personal shopper* dan akhirnya menjadi orang yang memiliki jaringan.

Kunci utama dalam layanan logistic adalah mempertemukan langsung si penjual dengan pembeli. Untuk itu harus dipertimbangkan seberapa *middle man* yang harus dibuang dan biaya logistik. Apabila dua faktor itu hilang, maka harga pangan akan menurun di Indonesia.

Lalu kemudian Nadiem melahirkan ide layanan pesan makanan dari Go-Jek, bernama Go-Food. Pada awalnya dikembangkan, layanan jenis Go-Food ini dianggap remeh banyak pihak.

"Apa benar abang-abang ojek yang biasa ngopi-ngopi, *nongkrong* dan merokok di pinggir jalan itu bisa memasuki *food court* lalu memesan makanan," kata Nadiem saat ada temannya yang menanyakan Go-Food ini.

Menurut Nadiem, orang-orang kita sendiri yang menganggap profesi ojek ada di kasta paling bawah. Filosofi Go-Jek adalah membantus emua orang dari semua kelas. Go-Jek tidak memandang kelas sosial. Dari mulai anak sekolah sampai dengan eksekutif bisa menggunakan layanan ini.

Media mengatakan bahwa *startup* ini baru saja mendapatkan investasi lumayan besar dari investor internasional yang cukup terkenal. Namun Nadiem menolak untuk berkomentar lebih jauh soal hal ini.

Ketika saya menanyakan seberapa besar nilai transaksi harian untuk Go-Jek, Nadiem hanya terkekeh dan mengatakan, "Ga bisa, mas, ntar investor kita pada lari. Dapur ini, mas."

Terakhir, Nadiem membeberkan bahwa sebentar lagi tarif promo Go-Jek akan menyesuaikan dengan tariff transportasi lainnya. Ia juga mengatakan bahwa harus ada standarisasi keamanan yang lebih baik di layanan Go-Jek. Surat ijin mengemudi saja tidak cukup. Standarisasi motor dan *rating* dari pelanggan jadi ide-ide baru untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pelanggan. []



# Ojek muncul sejak tahun 1969 di Jawa Tengah

mulai tahun 1974 ojek sepeda motor mulai muncul di Ancol Jakarta

## BEDANYA APA?

### GOJEK VS OJEK



disamperin ke pangkalan OJEK setempat.

Tarifnya tawar-menawar dengan si tukang ojek.  
Layanan bervariasi tergantung penawaran dan kesanggupan tukang ojek.

Langsung bayar & bisa ngutang kalau langganan.

Bisa dipanggil pakai Gojek Apps.

Tarif tetap berdasarkan jarak dilihat dari aplikasi google maps.

Layanan bervariasi ditampilkan di Gojek Apps.

bayar tunai dan non tunai via Gojek kredit.

## KESAMAANNYA?

UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan Ojek sebagai moda transportasi darat.

Tidak memiliki izin sebagai moda transportasi.

Tidak terikat kontrak kerja perusahaan angkutan atau bisa disebut juga sebagai kotraktor individual.

STEVE STANLEY  
Founder KebunBibit

# “KEBUN BIBIT, BUKAN SEKADAR TOKO TANAMAN ONLINE BIASA”



Antaran memiliki ribuan koleksi tanaman di pekarangan rumahnya, Steve Stanley memiliki ide menjual sebagian tanaman miliknya. Awalnya ia melakukan promosi melalui aplikasi *Blackberry Messenger* (BBM). Ternyata, koleksi tanamannya cukup bisa diterima pasar.

Kebun Bibit didirikan pada 2012. Awalnya, Steve melakukan *broadcast* produk secara manual, namun kebingungan karena melayani beberapa orang dan melakukan foto tanamannya secara langsung. Hingga akhirnya ia menggunakan jasa seorang programmer yang khusus ia datangkan dari Jakarta. Sampai kemudian sistem yang ia bangun berjalan dengan baik dan sekarang Kebun Bibit telah memiliki staf berjumlah 30 orang.

Saat ini, Kebun Bibit telah menjual lebih dari 3 ribu jenis bibit tanaman, mulai dari biji-bijian yang dibanderol dari harga 5 ribuan, berbagai jenis pot berharga puluhan ribu, hingga bonsai yang berharga puluhan juta rupiah.

Semua tanaman yang dijual di Kebun Bibit dijamin kualitasnya, karena telah melewati tiga tahapan, yakni mulai dari memilih bibit unggul, proses perawatan sebelum pengiriman kepada konsumen, sampai dengan proses edukasi setelah tanaman sampai kepada pembeli.

Di Kebun Bibit, Steve membuat diferensiasi dengan tiga hal, yakni kemasan yang menarik, layanan konsultasi, dan garansi hingga 14 hari tanaman bisa tumbuh. Di situs *kebunbibit.id* ia juga menjual beragam peralatan berkebun. Terdapat pula program lelang tanaman yang akan diluncurkan.

“Di Kebun Bibit, tanaman yang rusak dan patah lebih dari 50% akan dikirim ulang, jadi tidak perlu merasa khawatir kalau tanaman yang dibeli mati,” ujarnya.

Kebun Bibit memiliki standar tinggi di dalam setiap pengiriman produknya. Steve menjuluki

dunia *e-commerce* diperlukan pengetahuan tersendiri dimana para petani tersebut belum memiliki akses seperti dirinya.

Caranya, ia memposting tanaman milik para petani tersebut, lalu jika ada order, maka para petani tersebut akan mendapatkan notifikasi permintaan dari sistem Kebun Bibit.

“Kebun Bibit tidak ingin besar sendiri, kami ingin besar bersama. Petani-petani itu kami rangkul, kami jadikan mitra supaya mereka lebih berdaya dan paham bahwa teknologi memiliki manfaat,” ujarnya.

## **“Sejauh yang saya lihat, ya, pesaing Kebun Bibit itu baru sebatas produk online, belum mengarah seperti sistem yang Kebun Bibit miliki.**

dirinya perfeksionis, dan itu ia terapkan dalam menjalankan usahanya.

“Standar pengepakan itu selalu dipastikan dalam kondisi sempurna. Mulai dari range, ukuran produk, garansi dan *after sales*nya bagi Kebun Bibit adalah yang utama. Kalau paket *peyot*, kami diskon 10 %,” tegasnya.

Untuk sistem pemasaran, Steve bekerjasama dengan beberapa distributor. Mulai dari *Kaskus*, *Tokopedia*, *Rakuten*, *Elevenia*, *Lazada* dan beberapa *online shop* terkemuka di tanah air yang cukup ternama. Untuk merambah pasaran anak muda, Steve juga pernah bekerjasama dengan *Maliq & D’Essentials*, caranya yakni dengan menjual CD dengan bonus tanaman.

“Bagi kebanyakan orang, mungkin ini terdengar aneh, *khan?* Menggabungkan antara konsep bisnis tanaman hias dengan musik,” ujarnya dengan terkekeh.

Bukan hanya mencari untung, Steve memiliki kepedulian cukup tinggi terhadap para petani di sekitar Kebun Bibit. Ia telah merangkul kurang lebih 70 orang yang bergabung di Kebun Bibit. Steve cukup paham bahwa untuk memasuki

Untuk memantau perkembangan competitor Kebun Bibit, Steve memiliki sistem monitoring pelaku usaha. Ia membuat sejenis grafik dari produk terakhir dan jumlah order per hari. Jika ternyata produknya *update* dan terus bertambah, artinya toko tersebut berjalan dengan baik, hidup.

Namun sejauh ini Steve merasa belum menemukan *competitor* seimbang dalam bisnis tanaman hias berbasis online ini.

“Sejauh yang saya lihat, ya, pesaing Kebun Bibit itu baru sebatas produk *online*, belum mengarah seperti sistem yang Kebun Bibit miliki. Aspek kreatifitas juga terus kami asah, *lho*. Ini yang membuatnya berbeda dengan kompetitor-kompetitor lainnya,” tegasnya.

Dengan pengiriman per hari kurang lebih sebesar 3 ratus barang dan *traffic website* sebesar 5 ribu orang per hari, Steve sangat yakin Kebun Bibit bisa bertahan dan bersaing.

Ia mengaku sangat optimistis terhadap prospek usaha yang berhubungan dengan tanaman ini, pasalnya saat ini berkebun telah menjadi gaya hidup di kota-kota besar. []



## BLUSUKAN KE PASAR CIPINANG, KETUA KPPU CEK DUGAAN PERMAINAN BERAS

**M**enindaklanjuti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf pada 13 November 2015, dimana Presiden KPPU untuk memberantas dugaan kartel pada sektor pangan, Rabu (18/11), KPPU melakukan sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta untuk melihat langsung kondisi riil stok (pasokan) beras dilapangan.

Dipimpin langsung oleh Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf dengan beberapa Anggota Komisioner, KPPU ingin memastikan tentang laporan berkurangnya pasokan beras ke Jakarta.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf dan beberapa komisioner blusukan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, (18/11/2015).

“Kita ingin mendalami pasokan di sini apakah berkurang atau tidak, apa karena produksi tidak ada, atau ada permainan kita mau tindak lanjuti, kita mau lihat dulu,” ujar Syarkawi saat berbicara dengan salah satu pedagang beras.

Setelah melakukan diskusi dengan beberapa pedagang beras, Syarkawi menemui langsung Ketua Umum Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta, Zulkifly Rasyid.

Zulkifly Rasyid menyampaikan curhatan ke para Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang blusukan di Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Salah satu yang dicurahkan adalah soal stok beras medium atau IR 64 atau beras golongan III yang pasokannya berkurang.[]



## KETUA KPPU: JIKA ADA PERMAINAN “MAFIA” BERAS, KPPU AKAN TINDAK TEGAS!

**S**etelah beberapa hari yang lalu melakukan sidak beras ke Pasar Induk Cipinang, KPPU kembali melakukan blusukan ke Pasar Induk Beras Karawang (PIBK), Jum'at (28/11/2015). Blusukan ini langsung dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf dan R. Kurnia Sya'ranie dan Anggota KPPU Sukarmi.

Berdasarkan temuan lapangan saat melakukan sidak di Cipinang, KPPU melihat adanya perilaku bisnis tidak sehat dalam mata rantai distribusi beras di Jakarta. Saat ini, meski terdapat kelangkaan beras medium, sejumlah pemasok beras dari sejumlah daerah

mengaku kesulitan memasok beras ke Jakarta. Pada akhirnya, hal ini membuat pasokan beras medium mengalami kelangkaan, sehingga harganya menjadi naik.

“Saya pimpin langsung sidak ini untuk tahu bagaimana kondisi beras yang masuk ke Jakarta. Kemarin, ketika sidak ke Cipinang, beras IR 64 medium itu harganya Rp 8.900 – Rp 9.000 yang untuk beras medium, tapi stoknya sedikit. Di Karawang ini, buktinya 3-4 toko besar yang semuanya kita datangi stoknya masih banyak,” tutur Syarkawi.

Menurut Syarkawi, indikasi permainan ini ada di permainan distribusi beras, yang khusus ke Jakarta. Maka dari itu dirinya telah menugaskan tim investigator terbaik KPPU untuk segera menelusuri kejadian ini.

“KPPU akan mendalami bagaimana alur distribusi beras ini. Siapa yang sebenarnya membuat pasokan beras jadi terhambat seperti sekarang. Jika terbukti ada perilaku persaingan tidak sehat, tentu KPPU akan tindak tegas,” ujar Syarkawi.[]

# KAPOLRI DUKUNG PENUH KPPU BERANTAS KARTEL



**K**apolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mendukung penuh upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha, khususnya terhadap kasus-kasus kartel yang saat ini sedang ditangani KPPU. Hal ini diungkapkan saat menemui Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf dan segenap Anggota Komisi, di Jakarta, Trunojoyo (15/10).

Selama kurang lebih satu jam menemui KPPU, kedua pihak berbincang tentang perkembangan isu penegakan hukum persaingan usaha termasuk perkembangan kegiatan terbaru antara KPPU dengan Polri yang sebelumnya telah meneken kerjasama pada 2010.

Dalam pertemuan ini, Ketua KPPU menyampaikan bahwa beberapa salah satu kendala dalam penegakan hukum persaingan usaha adalah terkait penenaan denda. Seperti diketahui, beberapa

terlapor yang telah dihukum KPPU belum melaksanakan putusan KPPU, termasuk yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Saya berharap, MoU yang telah KPPU-Polri jalan lebih diperdalam lagi pelaksanaannya. Karena beberapa terlapor belum benar-benar mematuhi putusan KPPU maupun MA,” tutur Syarkawi.

Sementara itu Badrodin menuturkan bahwa pihaknya sangat siap jika sewaktu-waktu KPPU membutuhkan dukungan penegak hukum dari lingkungan Polri. Ia berjanji akan memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mendukung KPPU menangani perkara persaingan usaha ini, khususnya dalam hal penenaan denda.

“Tidak hanya penenaan denda yang akan kami dukung untuk KPPU, penanganan perkara seperti kartel yang merugikan banyak pihak ini akan kami bantu selesaikan,” tegas Badrodin.[]

# KPPU AWASI PELAKU USAHA PENYEDIA FASILITAS KESEHATAN



Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap perilaku bisnis pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Market KPPU, Jakarta, (15/10).

Beberapa asosiasi kesehatan yang ikut dalam FGD ini antara lain Asosiasi Rumah Sakit Swasta, Asosiasi Klinik, Perhimpunan Dokter Keluarga, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia.

Anggota Komisi Kamser Lumbanradja yang membuka secara resmi kegiatan ini mengungkapkan bahwa FGD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam

layanan di sektor kesehatan. Menurut Kamser, penetapan mitra penyedia fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional harus mengacu pada prinsip UU No. 5 tahun 1999.

“Kebutuhan mendasar bagi masyarakat sekarang ini adalah kesehatan, karena ia bagian terpenting dari pembangunan nasioal. Maka sudah seharusnya ada keteraturan dalam penetapan mitra penyedia fasilitas kesehatan,” ujar Kamser.

Turut hadir dalam FGD ini adalah Anggota KPPU Saidah Sakwan, Plt. Deputi Pencegahan Taufik Ahmad, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur, dan perwakilan dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, Diah Ayu Puspandari.[]

# KPPU KEMBALI PANGGIL GPPU DAN KEMENTERIAN PERTANIAN



[www.bigdutchman.id](http://www.bigdutchman.id)

**S**etelah beberapa waktu yang lalu sempat tertunda memanggil Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) (30 September 2015), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali melakukan pemanggilan untuk melakukan klarifikasi, Senin (5/10).

Selain memanggil GPPU, KPPU juga mengundang Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kasubdit dan Kasie Kementan.

Dalam proses klarifikasi ini KPPU akan menilai apakah terdapat potensi dugaan kartel yang dilakukan perusahaan pembibitan, yaitu dengan cara membatasi produksi untuk mengontrol harga.

KPPU juga akan menilai apakah kesepakatan pemusnahan 6 juta bibit ayam yang dilakukan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama-sama dengan 12 perusahaan pembibitan ayam yang bergabung dalam GPPU itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila tindakan tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu dapat berpotensi sebagai pelanggaran kartel sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saat ini, KPPU juga masih melakukan pengawasan dugaan kartel dalam industri daging ayam menyusul terjadinya lonjakan harga daging ayam di pasar.[]



# KPPU AKAN BANTU PEMERINTAH KAJI KEBIJAKAN DI SEKTOR TRANSPORTASI

**F**enomene Go-Jek - terlepas belakangan ini mendapat perhatian khusus dari Menteri Perhubungan, boleh dibilang telah memunculkan nilai lebih dalam satu hal, yakni inovasi bisnis yang mampu menjawab masalah tingginya biaya transportasi di negeri ini.

Maka tak heran jika apresiasi terhadap *startup* yang dinahkodai Nadiem Anwar Makarim ini - yang konon katanya 'bermusuhan' dengan GrabBike, mendapat perhatian cukup baik dari Presiden JokoWidodo dan sempat diajak berkeliling ke Silicon Valley, Amerika Serikat, beberapa waktu yang lalu.

Menurut Nadiem - yang datang ke KPPU bukan untuk melapor, namun untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan - pihaknya merasa Go-Jek ini menunjukkan kepada kita perkembangan teknologi dan segala bentuk inovasi didalamnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kegiatan yang bernilai tambah tinggi.

"Menurut saya, *startup* seperti Go-Jek ini mengajak kita untuk belajar bagaimana sebuah bentuk usaha yang meningkatkan taraf hidup orang banyak itu membutuhkan dukungan kebijakan yang sifatnya inklusif," ujar Nadiem yang bertemu Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, Senin, (21/12/2015).

Kehadirannya juga mampu menghapus berbagai persoalan transportasi, terutama di kota besar seperti Jakarta. Di saat yang sama, kita melihat bagaimana adanya standardisasi harga, layanan, dan bagi pengendaranya adalah bentuk pengakuan terhadap profesi ojek itu sendiri.

Sementara itu, secara khusus Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf mengungkapkan bahwa



keberadaan bisnis berbasis aplikasi seperti Go-Jek, GrabBike, Blue-Jek dan aplikasi lainnya ini akan membuka pasar yang seluas-luasnya bagi *provider* di semua jasa, karena bisnis yang dilakukan bukan hanya menguntungkan bagi ojek itu sendiri. Bisnis ini, terang Syarkawi, saling berkaitan dan berhubungan dengan bisnis lain.

Bisnis aplikasi online ini memudahkan inefisiensi yang selama ini dibebankan kepada konsumen melalui harga yang tinggi. Menurut Syarkawi, keberadaan bisnis berbasis aplikasi ini memberikan penawaran harga yang lebih murah sehingga inefisiensi tidak lagi ditanggung oleh konsumen.

Lebih jauh, KPPU akan melakukan pertemuan dan berdiskusi langsung dengan Kementerian Perhubungan yang sebelumnya menyatakan ojek aplikasi tak sesuai aturan walaupun kemudian mencabutnya kembali.

Sementara itu dengan tegas Syarkawi mengatakan bahwa jangan sampai peraturan perundangan ketinggalan zaman dengan bisnis model yang akan terus berkembang. KPPU, akan berinisiatif memberikan masukan terhadap kebijakan di sektor transportasi ini. []



## PERTANYAAN

Saya Legal Counsellor di salah satu perusahaan telekomunikasi yang berdomisili di Jakarta. Perusahaan kami terlebih dulu berkantor di Jakarta, sehingga perusahaan kami akan sering berkonsultasi dalam rangka *compliance* dan diskusi aspek-aspek legal yang ada di BUMN.

Saya ingin bertanya, mengenai adanya hambatan terhadap produk perusahaan kami dalam memasuki beberapa kawasan perumahan maupun apartemen yang ada di wilayah Indonesia. Bagaimakah batasannya dari perspektif KPPU terhadap hambatan produk telekomunikasi perusahaan kami ini?

Saya juga bertanya bagaimana dengan jaringan yang masuk ke kawasan? Perusahaan kami tidak dapat masuk, karena tidak memperoleh izin dari pengelola kawasan?

Terima kasih atas jawabannya.

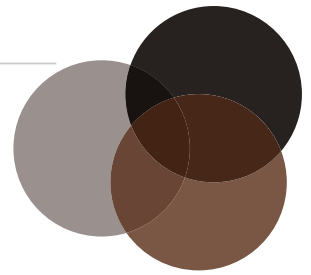
JS-Jakarta.

## JAWABAN

Menurut hemat kami, sudahkah perusahaan Saudara melakukan konsultasi terlebih dulu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai regulator? KPPU sendiri memandang dari aspek pengawasan dan harus melihat *case by case* termasuk dalam menentukan batasan. Batasannya bisa jadi karena ada *entry barrier* provider ke pelanggan atau bentuk lainnya. Sebagai contoh, KPPU pernah menangani laporan yang menghalangi layanan, setelah tim melakukan kroscek ke pasar terkait harga, produksi dan lainnya ternyata secara nyata memang tidak ada kompetitor yang mau masuk ke pasar.

Perlu dikaji lagi apakah bersaing di level distributor yang diperbolehkan, sedangkan untuk pelanggan/*end consumer* tidak diperbolehkan? Bisa saja pembuktian apakah kompetitor yang menghalangi tersebut efisien atau tidak, termasuk ada tidaknya pendapat maupun usaha untuk menyingkirkan, misalkan kami siap menanggung jalan yang dihancurkan untuk membangun jaringan. Kembali lagi kepada intensi positif atau negatif?

Secara lebih lengkap ada di pembahasan Pasal 14 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



## **PERTANYAAN**

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian tentang analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan. Pertanyaan Saya, apakah KPPU dapat membatalkan persetujuan merger yang telah diberikan Menkumham seperti yang diamanatkan pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5/1999 (kaitannya dengan PP 57 Tahun 2010); dan 2. Bagaimana status hukum perseroan yang telah berakhir karena hukum akibat melakukan penggabungan atau peleburan yang kemudian merger tersebut dibatalkan oleh KPPU?

Terima kasih atas jawabannya.

NS-Jakarta.

## **JAWABAN**

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka KPPU berwenang membatalkan persetujuan penggabungan (merger) yang sebelumnya telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemendiknas").



## KETIKA KPPU-1 BERTEMU MENDAG

Pada Desember ini, tepatnya Senin (21/12/2015), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf mengundang Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk bertemu empat mata. Selama ini, hal seperti itu jarang dilakukan oleh kedua pimpinan lembaga yang sama-sama focus dalam kegiatan ekonomi di tanah air.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam di ruang utama kantor KPPU ini berlangsung secara tertutup. Lembong yang datang mengenakan setelan atasan putih, bawahan hitam Nampak sumringah saatpuluhan awak media yang terbiasa *nongkrong* di KPPU menyorotkan kamera kearahnya. Tidak seperti beberapa pejabat yang 'gemar' membawa 'penasehat', Lembong datang sendiri, hanya ditemani pengawal dan rombongan voorrijder.

### Sepenuh Hati Mendukung

Setelah selesai melakukan pertemuan dengan Lembong, Syarkawi mengajak orang nomor satu di Kementerian Perdagangan itu untuk bertemu dengan awak media. Syarkawi berharap agar pertemuan tersebut menjadi komitmen yang diketahui public bahwa persoalan kartel tidak bisa ditangani KPPU sendirian.

"Yang namanya perdagangan itu pasti dan selalu identik dengan kompetisi. Lalu kompetisi itu sendiri sejatinya bisa memberikan dampak positif. Tapi, sayangnya kompetisi juga memiliki sisi tidak baiknya, yaitu perilaku monopoli. Ini yang Saya bicarakan dengan KPPU. Apalagi sekarang MEA sudah di depan mata," ujar Lembong saat dikonfirmasi terkait dengan isi pertemuan itu.

Ia menambahkan bahwa pertemuan tertutup antara dirinya dengan Ketua KPPU adalah bagian dari sinergi lembaga. Menurut Lembong, KPPU adalah lembaga yang patut jadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beberapa kali dirinya bertemu Ketua KPPU saat keduanya dipanggil keistana. Dari pertemuan tersebut Presiden memerintahkan agar secepat mungkin kedua pihak segera melakukan koordinasi.

Secara khusus Lembong memberikan dukungan agar persoalan kelembagaan KPPU segera selesai. Bagaimanapun, pada 2016 nanti semua lembaga yang pendanaannya bersumber dari APBN wajib mematuhi undang-undang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, jika persoalan kelembagaan ini selesai, ia yakin KPPU mampu bekerja lebih maksimal.

"Sekarang saja kerja-kerja KPPU bisa kita lihat seperti apa hasilnya. Kasus-kasus kartel sampai dengan tender berhasil KPPU bereskan. Saya dukung penuh penyelesaian kelembagaan KPPU ini," tegas Lembong.

Sementara itu Syarkawi mengungkapkan bahwa pertemuan dirinya dengan Mendag adalah upaya untuk membahas pengawasan distribusi pangan. Selain instruksi Presiden, pertemuan ini adalah bagian dari sinergi lembaga yang memang seharusnya terus dilakukan.

"Pertemuan saya dengan Pak Mendag untuk berkoordinasi. Pertama, dulu ketika bertemu dengan Pak Jokowi di istana Negara ada dua hal penting yang kita diskusikan. Pertama soal koordinasi pengawasan distribusi pangan strategis, seperti beras dan seterusnya," ujar Syarkawi di depan awak media. []

**STOP  
KARTEL  
SEKARANG  
JUGA !**

**KARTEL HARGA  
MERUGIKAN  
KONSUMEN**

**60.000**

**60.000**

**60.000**



*mazis*